



NASIONALISME YUNANI DAN INTEGRASI EROPA

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras, Yunani berusaha mendapatkan utang baru dari negara-negara zona Euro tanpa disertai dengan persyaratan ketat yang hanya akan membuat perekonomian negara itu semakin hancur. Dukungan yang diperoleh melalui referendum tanggal 6 Juni 2015, belum cukup bagi Tsipras untuk membawa keluar negaranya dari intervensi negara-negara zona Euro. Rakyat Yunani tetap harus menerima persyaratan pinjaman jika tetap ingin berada dalam zona Euro.

Pendahuluan

Alexis Tsipras dilantik sebagai Perdana Menteri Yunani pada tanggal 25 Januari 2015 setelah Partai Syriza yang dipimpinnya berhasil memenangkan pemilu Yunani. Tokoh yang sering digambarkan media massa sebagai simbol pemuda dan perubahan, Tsipras memimpin Partai Syriza dan berhasil memenangkan 36,3 persen suara, sementara partai Demokrasi Baru yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Antonis Samaras hanya memperoleh 27,8 persen suara.

Popularitas Tsipras dan Partai Syriza meningkat pesat berkat slogan anti-penghematan yang selalu didengungkan kepada rakyat Yunani selama masa kampanye. Ia selalu menentang rencana pemulihan yang dianjurkan oleh troika

(Komisi Eropa/EC, Bank Sentral Eropa/ECB dan Dana Moneter Internasional/IMF) berupa kebijakan penghematan, pemangkasan dana pensiun dan peningkatan pajak untuk mengatasi krisis utang Yunani.

Dalam pernyataan pertamanya setelah memenangi pemilihan umum, ia memastikan tidak akan ada konfrontasi dan risiko kegagalan, dan keluar dari zona Euro, tetapi tetap dengan kesepakatan saling menguntungkan dalam mengelola utang Yunani. PM Tsipras berencana melakukan negosiasi ulang dana talangan Yunani, membalikkan tingkat pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya, merestrukturisasi utang secara berlanjut dan menerapkan kebijakan untuk merestorasi pertumbuhan ekonomi.

Konsisten dengan janji politiknya

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: dhanny_2000@yahoo.com



selama kampanye, pada tanggal 6 Juli 2015, Tsipras mengadakan referendum untuk mengetahui suara rakyatnya apakah menyetujui syarat penghematan yang diajukan oleh troika jika Yunani menginginkan dana talangan tahap ketiga. Hasil referendum menunjukkan bahwa 61,3 persen lebih rakyat Yunani menolak persyaratan tersebut. Dengan penolakan ini, Uni Eropa dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mempertahankan Yunani dengan mengajak melakukan negosiasi ulang atau mengeluarkan Yunani dari zona Euro.

Tulisan ini akan menganalisis secara ringkas apakah nasionalisme baru yang ditunjukkan oleh PM Alexis Tsipras dan kelompok kiri lainnya di Yunani mampu meredam berbagai persyaratan yang diajukan oleh Troika?

Nasionalisme Baru Yunani

Masalah keuangan di zona Eropa muncul karena Yunani tidak mau menjalankan kewajibannya. Sejak Maret 2015 negara ini sudah harus membayar cicilan utang dan bunga senilai 11 milyar Euro dari utang yang diterima tahun 2010 sebesar 240 milyar. Alasan Yunani tidak mau memenuhi kewajibannya itu, menurut PM Tsipras, karena berbagai program penghematan yang dipersyaratkan oleh troika tidak menolong negara itu dari kebangkrutan. Karena itu, sejak bulan Februari 2015, atau sebulan setelah dilantik, Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis telah melakukan pendekatan ke negara-negara Eropa untuk mencari dukungan dalam *bailout* utang luar negerinya yang berjumlah 240 milyar. Presiden AS Barack Obama mendukung upaya Yunani ini dengan mengatakan bahwa penerapan program penghematan ketat terhadap Yunani akan berdampak seperti bumerang kepada para kreditor.

Pemerintahan baru Yunani di bawah PM Alexis Tsipras, yang berhaluan anti program penghematan, sejak awal memang menolak bekerja sama dengan para inspektur internasional dari troika terkait reformasi keuangan negara tersebut. Pemerintah baru Yunani menuntut akses langsung ke masing-masing lembaga pemberi utang untuk melakukan negosiasi. PM Alexis Tsipras ingin segera melihat

perekonomian negaranya pulih dengan mendesak Troika membebaskan utang negaranya dan tidak menuntut Yunani berhemat meskipun Yunani menerima utang baru dari Uni Eropa dengan bunga yang rendah.

Untuk memperkuat argumentasinya, PM Tsipras mengadakan referendum untuk mengetahui pendapat rakyat apakah setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai konsekuensi dari penerimaan dana talangan baru. Bagi PM Tsipras, referendum akan membuka jalan baru bagi semua bangsa Eropa untuk kembali ke nilai-nilai demokrasi dan solidaritas di Eropa. Hasil referendum menunjukkan sebanyak 61,3 persen dari 9,8 juta warga Yunani yang memberikan suara menyatakan menolak kebijakan pengetatan sebagai syarat program dana talangan Troika.

Kendatipun ada ancaman bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dengan kreditor akan memicu keluarnya Yunani dari zona Euro, Menteri Keuangan Yanis Varoufakis menyatakan penolakan rakyat Yunani terhadap bailout kreditor asing itu akan membantu Yunani menyembuhkan luka ekonominya. Dia berjanji bahwa Yunani akan terus memperkuat kerja sama dengan kreditor Uni Eropa-IMF.

Selama ini dengan tunduk pada syarat-syarat Troika, Yunani harus banyak melakukan pengetatan, termasuk pada dana pensiun. Ketika Yunani membutuhkan dana talangan untuk membayar utang dan membiayai negara, troika memperketat persyaratan yang harus dipenuhi Yunani, yaitu menaikkan pajak dan memotong dana pensiun.

Keadaan seperti ini bertolak belakang dengan janji kampanye Tsipras kepada rakyat Yunani dalam pemilu bulan Januari 2015 lalu, yaitu meminta renegotiasi utang agar bisa punya ruang fiskal untuk mengangkat ekonomi. Di sisi lain, beberapa pejabat Eropa sudah mengimbau Yunani untuk tetap pada program *bailout* yang sudah disepakati. Tsipras ingin membawa Yunani hidup lebih bermartabat dengan tidak lagi mengindahkan persyaratan utang yang diberikan oleh negara-negara Eropa. Dukungan masyarakat Yunani terhadap PM Tsipras ternyata sangat tinggi.

Win-win Solutions?

PM Tsipras dan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis sangat meyakini, penolakan rakyat Yunani melalui referendum akan memberi mereka mandat lebih besar untuk bisa menuntut persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Yunani. Menyusul hasil referendum tersebut, baik PM Tsipras maupun negara-negara zona Euro sedang mempertaruhkan kewibawaan mereka.

Bagi PM Tsipras, jika ia gagal mewujudkan janjinya membuat persetujuan baru dengan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Yunani, maka posisinya sebagai perdana menteri berhaluan kiri pertama di Yunani akan tamat. Kekuasaannya juga terancam terdelegitimasi jika kreditor mempersyaratkan adanya pemerintahan Yunani yang lebih kooperatif sebagai syarat adanya dana talangan baru.

Sementara bagi negara-negara zona Euro, tunduk pada kemauan Yunani sama artinya dengan pendiktean oleh satu negara. Negara-negara zona Euro tidak akan mau satu negara yang secara ekonomi tidak signifikan karena hanya menyumbang 2 persen terhadap PDB zona Euro, dapat menyeret mata uang tunggal Euro dalam krisis. Apalagi Yunani selama ini dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif. Sayangnya, zona Euro belum mempunyai pengaturan yang baku bila ada negara yang ingin meninggalkan zona Euro, sehingga organisasi keuangan Eropa ini harus berusaha mempertahankan keanggotaan Yunani, sekaligus menghindarkan kehancuran lebih jauh.

Karena itu, menyusul hasil referendum rakyat Yunani, pilihan yang dilakukan oleh negara-negara zona Euro adalah mengajak Yunani berunding kembali. Kedua belah pihak melakukan negosiasi baru untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya. Hasilnya? Setelah melakukan perundingan selama 17 jam yang mempertaruhkan masa depan integrasi Eropa, PM Yunani Alexis Tsipras yang tidak menginginkan negaranya keluar dari zona Euro akhirnya menerima syarat-syarat yang disusun mitra-mitranya dari zona Euro. Kesepakatan itu

mempersyaratkan parlemen Yunani harus meratifikasi serangkaian undang-undang berorientasi pasar dalam waktu satu minggu saja. Ratifikasi ini harus dilakukan sebagai simbol dari niat baik Yunani untuk menaati kesepakatan, yang implementasinya akan diawasi ketat oleh IMF.

Hanya dengan dengan kesepakatan seperti itu, 18 pemimpin zona Euro setuju untuk mengalirkan dana talangan senilai 86 miliar Euro dalam program penyelamatan tahap ketiga dalam lima tahun kepada Yunani. Kesepakatan itu merefleksikan komitmen para kreditor Yunani untuk memberikan dukungan keuangan dan membantu menciptakan jalan bagi Yunani untuk kembali ke pertumbuhan dan mencapai keberlanjutan utang. PM Tsipras pun akhirnya setuju dengan usulan baru negara-negara zona Euro.

Guna merespons kesepakatan itu, parlemen Yunani pada tanggal 16 Juli 2015 secara mayoritas menyetujui rancangan undang-undang tentang reformasi yang disyaratkan oleh negara kreditor sebagai imbalan pemberian dana talangan tahap tiga. Dalam perhitungan akhir, 229 anggota parlemen memilih setuju terhadap RUU Reformasi, sementara 64 anggota parlemen menolak dan enam anggota parlemen menyatakan abstain. Partai pemerintah Syriza yang radikal berhasil meloloskan RUU itu berkat dukungan partai oposisi yang pro-Eropa, di tengah-tengah banyaknya anggota parlemen menolak RUU tersebut, termasuk mantan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis, Ketua Parlemen Zoe Constantopoulou dan Menteri Energi Panagiotis Lafazanis.

PM Alexis Tsipras yang nyaris membuat partainya terbelah menjadi dua dalam proses ini, bersikeras bahwa dirinya tidak setuju terhadap mayoritas kesepakatan yang menuntut kenaikan pajak kepada rakyat, perubahan total sistem pensiun dan privatisasi. Kendatipun demikian, pada akhirnya Tsipras mengakui bahwa Yunani tidak mempunyai pilihan lain jika ingin tetap bertahan di zona Euro. Tsipras bertekad untuk tetap memperjuangkan kelas pekerja negerinya namun ia tidak punya pilihan lain selain menerima persyaratan negara-negara zona Euro dengan alasan berbagi beban. Melalui kesepakatan terakhir ini

perekonomian Yunani bergairah kembali di tengah kekhawatiran perbankan mereka akan mengalami krisis likuiditas yang sempat memicu keinginan negara itu untuk keluar dari rezim mata uang bersama euro.

Zona Euro beranggotakan 19 negara. Semua negara yang memasuki zona Euro, pengguna mata uang tunggal Euro, mengetahui bahwa tidak ada bantuan tanpa syarat. Satu syarat utama adalah menjalankan disiplin ekonomi. Lebih dari itu, bantuan yang diberikan bukan kewajiban hukum tetapi hanya solidaritas sesama negara-negara zona Euro. Karena itu resiko dari pilihan yang diambil Tsipras untuk bertahan di dalam zona Euro adalah negaranya harus menerima persyaratan yang diminta oleh para kreditor.

Ada jasa, ada hasil keringat, ada penghasilan. Itulah yang diperlukan Yunani saat ini. Rakyat Yunani tidak akan mempunyai penghasilan dengan mencetak uang karena hanya akan menghasilkan inflasi. Teori dasarnya adalah uang adalah alat transaksi barang dan jasa. Uang yang dicetak harus sebanding dengan barang dan jasa yang diproduksi sendiri. Yunani selama ini tidak memproduksi secara signifikan dan hidup hanya karena utang yang berasal dari troika.

Kesimpulan

Semangat nasionalisme baru Yunani yang ditawarkan PM Alexis Tsipras tidak mampu memaksakan kehendak negara tersebut pada negara-negara pemberi utang. Meskipun pemerintahannya mendapat dukungan publik melalui referendum, tetapi pada akhirnya PM Alexis Tsipras tetap harus tunduk pada keinginan negara-negara troika. Ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri, telah menggagalkan “mimpi” PM Tsipras untuk membawa Yunani menjadi negara yang berdaulat.

Krisis Yunani diperkirakan kecil kemungkinan akan berdampak terhadap Indonesia karena Yunani bukan mitra dagang atau investor utama Indonesia. Kendatipun demikian terdapat pelajaran penting yang bisa diambil diambil DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah dari krisis Yunani agar Pemerintah Indonesia tidak membuat utang di luar batas

kemampuan membayar kembali. Kedua, tidak membuat utang untuk membiayai pengeluaran rutin. Salah satu keburukan Yunani adalah ketergantungan yang sangat besar terhadap utang luar negeri dan kebiasaan menggunakan utang untuk membiayai birokrasi.

Referensi

- “Do more to earn rescue: EU”, *The Jakarta Post*, 13 Juli 2015
- “Survei Menunjukkan Opsi Ya Unggul”, *Media Indonesia*, 4 Juli 2015
- “Referendum Diprediksi Ketat”, *Kompas*, 4 Juli 2015.
- “Yunani Terbelah Dua”, *Kompas*, 5 Juli 2015.
- “Bailout Yunani Temui Jalan Buntu”, *Media Indonesia*, 13 Juli 2015.
- “Kredibilitas Yunani Dibahas”, *Kompas*, 13 Juli 2015.
- “Yunani janji Segera Reformasi”, *Kompas*, 9 Juli 2015.
- “Krisis Yunani Masukin Lorong Gelap”, *Kompas*, 8 Juli 2015
- “UE Tunggu Proposal Yunani”, *Kompas*, 8 Juli 2015.
- “Pengaruh Yunani hanya sementara”, *Media Indonesia*, 7 Juli 2015.
- “Dampak Yunani Jangka Pendek”, *Kompas*, 7 Juli 2015.
- “Prospek Yunani Pasca Referendum”, *Kompas*, 7 Juli 2015.
- “Rakyat Yunani Tentukan Sikap”, *Kompas*, 6 Juli 2015.
- “Tsipras: The premier playing roulette with Greece’s future”, *The Jakarta Post*, 6 Juli 2015.
- “Background on the Greek debt crisis”, *The Jakarta Post*, 6 Juli 2015.